

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih menghadapi berbagai tantangan serius dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara merata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 8,57% atau sekitar 24,06 juta orang. Ketimpangan kesejahteraan antara wilayah perkotaan dan pedesaan terlihat jelas, di mana angka kemiskinan di desa tercatat sebesar 11,34%, jauh lebih tinggi dibandingkan 6,66% di kota. Kondisi serupa juga tergambar dalam data BPS Kabupaten Bekasi (2024), di mana persentase penduduk miskin di Kabupaten Bekasi pada tahun 2023 mencapai 4,93%, dengan tren yang terus berfluktuasi sejak 2019 (4,01%) hingga sempat memuncak pada 2020 (4,82%) akibat dampak pandemi, dan belum sepenuhnya pulih secara merata hingga saat ini. Wilayah Muara Bakti, Babelan sebagai bagian dari Kabupaten Bekasi turut mencerminkan kondisi tersebut. Tingkat pendidikan masyarakat pada wilayah tersebut masih tergolong rendah. Penurunan ini ditandai dengan minimnya jumlah lulusan sarjana yang secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dan lambatnya pembangunan ekonomi lokal.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari BPS Kabupaten Bekasi (2024), data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, angkatan kerja di

Kabupaten Bekasi masih didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (50,63%) dan Sekolah Menengah Pertama (32,73%). Sementara lulusan Perguruan Tinggi hanya mencapai 16,64% dari total angkatan kerja.

Kondisi yang sama juga terlihat pada tahun-tahun sebelumnya, dimana proporsi lulusan perguruan tinggi hanya sebesar 14,29% pada 2022 dan 14,26% pada 2021. Rendahnya proporsi lulusan perguruan tinggi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat, termasuk di wilayah Muara Bakti Babelan, memiliki keterbatasan kapasitas pendidikan formal yang berdampak langsung pada kemampuan mereka untuk mengakses pekerjaan yang layak dan mengembangkan usaha secara mandiri. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas, lapangan pekerjaan, layanan kesehatan, serta infrastruktur dasar yang memadai. Rendahnya kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat menyebabkan ketergantungan terhadap bantuan eksternal semakin menguat dari waktu ke waktu, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial ini.

Adanya ketimpangan kesejahteraan dan rendahnya kapasitas ekonomi masyarakat tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan yang lebih mendasar, yaitu rendahnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam kehidupan sosial. Masyarakat di kawasan pinggiran cenderung bersikap pasif dalam kegiatan sosial dan pembangunan. Kondisi ini juga diperparah oleh tingginya angka pengangguran terbuka di Kabupaten

Bekasi yang sempat melonjak hingga 212.435 orang pada tahun 2020 akibat dampak pandemi, dan meskipun berangsur menurun menjadi 141.257 orang pada 2023, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan belum terselesaikan secara struktural. Hal ini diperkuat oleh data BPS Kabupaten Bekasi (2024) yang mencatat bahwa kelompok perempuan yang mengurus rumah tangga dan belum masuk dalam angkatan kerja produktif mencapai lebih dari 600.000 orang setiap tahunnya, yakni 630.754 (2020), 590.703 (2021), 685.564 (2022), dan 604.048 (2023). Berdasarkan data tersebut, angka ini merupakan yang terbesar di antara seluruh kategori bukan angkatan kerja, yang mengindikasikan bahwa kelompok perempuan, khususnya ibu rumah tangga, merupakan kelompok yang paling rentan secara ekonomi sekaligus paling potensial untuk diberdayakan melalui program keterampilan berbasis komunitas.

Desa Muara Bakti merupakan bagian dari wilayah pinggiran Kabupaten Bekasi dimana terjadi berbagai permasalahan sosial yang kompleks dan saling berkaitan. Pertama, kemiskinan struktural menjadi akar persoalan yang paling mendasar. Masyarakat Muara Bakti sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh dan pekerja sektor informal dengan penghasilan tidak menetap, sehingga rentan terhadap guncangan ekonomi. Hal ini diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang menyebabkan terbatasnya akses terhadap pekerjaan layak dan peluang pengembangan usaha mandiri. Kedua, marginalisasi perempuan dalam ruang ekonomi dan sosial menjadi persoalan yang tidak kalah serius. Data

BPS Kabupaten Bekasi mengindikasikan bahwa lebih dari 600.000 perempuan setiap tahunnya berada di luar angkatan kerja produktif karena mengurus rumah tangga, kelompok terbesar dari seluruh kategori bukan angkatan kerja. Realitas ini menggambarkan bahwa perempuan, khususnya ibu rumah tangga di wilayah seperti Muara Bakti, belum memiliki akses yang memadai terhadap peluang ekonomi maupun ruang partisipasi sosial. Ketiga, lemahnya kohesi sosial dan solidaritas komunitas turut memperburuk kondisi tersebut. Masyarakat cenderung bersikap individualistis dan tidak terbiasa bergerak secara kolektif dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan permasalahan bersama. Keempat, ketergantungan terhadap bantuan eksternal yang tinggi menjadi indikasi bahwa masyarakat belum berkembang menjadi agen perubahan yang mandiri. Program-program pemberdayaan yang masuk ke wilayah ini kerap bersifat *top-down* dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak meninggalkan kapasitas lokal yang berarti. Kelima, minimnya akses terhadap informasi mengenai hak-hak masyarakat, layanan publik, dan peluang pemberdayaan menyebabkan masyarakat tidak mengetahui cara mengadvokasi kepentingan mereka sendiri kepada pemerintah maupun pihak terkait lainnya.

Kelima permasalahan sosial tersebut pada hakikatnya bersumber dari satu persoalan yang lebih mendasar, yaitu rendahnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam kehidupan sosial. Minimnya partisipasi masyarakat ini sejatinya tidak hanya menjadi persoalan sosial semata, tetapi

juga mencerminkan belum terwujudnya *civic engagement* yang bermakna di tengah masyarakat. Salah satu upaya dalam menyelesaikan persoalan tersebut adalah diperlukan penguatan *civic engagement* sebagai strategi transformatif yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. *Civic engagement* didefinisikan sebagai tanggung jawab individu untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan sukarela guna memperkuat masyarakat, baik secara individu maupun kolektif (Adler & Goggin, 2005).

Dua aspek kunci yang menjadi pilar *civic engagement* adalah *civic participation* (partisipasi masyarakat) dan *civic awareness* (kesadaran masyarakat). Kesadaran ini harus muncul dari dalam diri masyarakat itu sendiri, digerakkan oleh inisiatif pribadi yang tulus, tanpa tekanan dari luar. Dalam konteks ini, partisipasi aktif mahasiswa menjadi sangat penting sebagai bentuk nyata perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada pilar pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukannya praktik *civic engagement* melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat yang terencana dan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan insidental yang bersifat responsif. Penguatan *civic engagement* yang terencana dan berkelanjutan diyakini mampu mendorong masyarakat untuk bertransformasi dari penerima bantuan pasif menjadi pelaku aktif pembangunan (Suaib, 2023).

Sejalan dengan pentingnya *civic engagement* tersebut, penguatan *civic engagement* yang efektif dapat diwujudkan melalui pemberdayaan

masyarakat, yakni upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan mengatasi permasalahannya secara mandiri. Salah satu bentuk konkret dari pendekatan pemberdayaan masyarakat yang telah terbukti efektif adalah melalui pendekatan *community development* yang terstruktur dan berkelanjutan.

Murray G. Ross (1967) menjelaskan bahwa *community development* adalah proses di mana anggota masyarakat berkumpul untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan mereka, mengambil keputusan bersama, dan bertindak secara kolektif untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat (Alifa et al, 2023). Dalam konteks ke-Indonesiaan, tujuan akhir dari *community development* adalah terbentuknya masyarakat madani dengan struktur sosial yang mandiri, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. *Civic engagement* menjadi konsep utama dalam *community development* karena menekankan keterlibatan nyata masyarakat negara dalam setiap tahap proses pembangunan (Farida, 2022).

Salah satu aktor yang merespons kebutuhan tersebut secara nyata, Paguyuban Karya Salemba Empat (KSE) UNJ, hadir dengan program *community development* yang telah berjalan selama kurang lebih dua tahun di wilayah Muara Bakti Babelan. Paguyuban KSE UNJ merupakan perkumpulan mahasiswa penerima beasiswa Karya Salemba Empat yang berbasis pada semangat solidaritas dan pengabdian masyarakat.

Program ini berfokus pada upaya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya perempuan, melalui pengembangan usaha rintisan berbasis keterampilan rumah tangga seperti kerajinan manik-manik dan ecoprint, dengan melibatkan 5 orang ibu-ibu masyarakat setempat dan 10 orang mahasiswa sebagai fasilitator. Relevansi program ini semakin kuat mengingat bahwa perempuan yang mengurus rumah tangga merupakan kelompok terbesar dalam kategori bukan angkatan kerja di Kabupaten Bekasi, sehingga pemberdayaan berbasis keterampilan rumah tangga menjadi pendekatan yang paling kontekstual dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, program *community development* Paguyuban KSE UNJ menekankan lima prinsip utama, yaitu: (1) *process and outcome*, (2) *the integrity of process*, (3) *participatory democracy*, (4) *cooperation*, serta (5) *community building* (Ife, 2013).

Program *community development* yang dijalankan merupakan wujud kolaborasi antara Paguyuban KSE UNJ, Yayasan Karya Salemba Empat, dan PT. Cikarang Litrindo sebagai bagian dari implementasi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Kolaborasi ini menjadikan program tidak hanya berlandaskan semangat sukarela mahasiswa, tetapi juga didukung secara kelembagaan dan sumber daya oleh pihak swasta dan yayasan, sehingga keberlanjutan dan dampak program dapat lebih terstruktur dan terukur.

Meskipun program tersebut telah berjalan selama dua tahun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tujuan program belum

sepenuhnya tercapai secara optimal. Berdasarkan observasi awal di wilayah Muara Bakti Babelan, ditemukan sejumlah kondisi yang mengindikasikan belum optimalnya *civic engagement* masyarakat setempat. Salah satu temuan yang paling mencolok adalah sangat minimnya partisipasi masyarakat dalam program *community development* ini. Terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan komunitas masih tergolong rendah, dan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu sosial di lingkungannya masih minim. Masyarakat belum sepenuhnya terlibat sebagai pelaku aktif dalam program-program yang berjalan, dan interaksi antara mahasiswa fasilitator dengan masyarakat masih bersifat sementara tanpa keberlanjutan yang jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kemasyarakatan yang seharusnya mendorong partisipasi aktif masyarakat masih berada pada tataran kognitif semata, dan belum terwujud dalam praktik nyata kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, wilayah Muara Bakti Babelan membutuhkan model keterlibatan yang lebih berkelanjutan, kontekstual, dan berorientasi pada pemberdayaan jangka panjang.

Fenomena minimnya partisipasi masyarakat dalam program *community development* ini juga mencerminkan kesenjangan yang ditemukan dalam kajian-kajian akademis sebelumnya. Studi-studi terdahulu banyak mengkaji *civic engagement* melalui pendidikan kewarganegaraan formal atau kegiatan organisasi kampus yang bersifat insidental, serta cenderung memisahkan antara *civic engagement* dan *community development*, padahal keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Hal ini

terbukti dalam penelitian Muqorobin et al. (2024) yang mengeksplorasi landasan, strategi, dan kontribusi Organisasi Jakarta Mengabdikan dalam memperkuat *civil society* melalui *civic engagement*, namun kajian tersebut belum mengintegrasikan dimensi *community development* secara menyeluruh.

Selain itu, penelitian Alifa et al. (2023) menemukan bahwa mahasiswa memiliki peran signifikan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), namun kegiatan tersebut masih bersifat insidental dan belum berkelanjutan, sehingga dampak jangka panjangnya terhadap penguatan *civic engagement* masyarakat menjadi terbatas. Hingga saat ini, kajian yang menggabungkan penguatan *civic engagement* dengan pendekatan *community development* masih sangat terbatas, dan belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji penguatan *civic engagement* melalui program *community development* berbasis kolaborasi mahasiswa dan CSR di kawasan pinggiran seperti Babelan. Kesenjangan penelitian (*research gap*) inilah yang menjadi dasar urgensi sekaligus landasan kebaruan penelitian ini.

Berlandaskan ketimpangan yang ditemui, penelitian ini hadir untuk menjembatani antara praktik *civic engagement* dan *community development* dalam satu kajian yang utuh dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat Desa Muara Bakti dalam program *Community Development* Paguyuban KSE

UNJ sebagai wujud *civic engagement* serta keterlibatan masyarakat dalam program *Community Development* Paguyuban KSE UNJ berperan dalam menumbuhkan kapasitas dan kemandirian masyarakat Desa Muara Bakti sebagai bagian dari penguatan *civic engagement*.

Penelitian ini memiliki relevansi kuat dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), karena *civic engagement* dapat diwujudkan melalui *civic education* non-formal berupa *civic community* yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berbasis pengalaman nyata di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian PPKn sekaligus menjadi pemantik bagi organisasi mahasiswa lainnya untuk mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengabdian masyarakat yang terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan nyata. Penelitian ini akan menjawab bagaimana penguatan *civic engagement* dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui program *community development* Paguyuban KSE UNJ di Muara Bakti Babelan.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari dua kondisi yang saling berkaitan. Pertama, belum optimalnya *civic engagement* masyarakat di wilayah Muara Bakti Babelan, yang tercermin dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan tanggung jawab kemasyarakatan mereka, minimnya partisipasi dalam kegiatan komunitas, serta belum tumbuhnya inisiatif kolektif dari dalam masyarakat itu sendiri. Kondisi ini mengakibatkan permasalahan sosial

yang ada seperti kemiskinan, marginalisasi perempuan, dan ketergantungan pada bantuan eksternal terus berlangsung tanpa adanya daya dorong perubahan dari masyarakat secara mandiri. Kedua, belum adanya kegiatan pengabdian masyarakat yang bersifat berkelanjutan, kontekstual, dan berorientasi pada pemberdayaan jangka panjang di wilayah tersebut. Praktik pengabdian masyarakat yang selama ini cenderung insidental dan administratif menyebabkan keterlibatan mahasiswa belum sepenuhnya membentuk kesadaran kemasyarakatan yang aplikatif dan berdampak jangka panjang bagi masyarakat.

Pada aspek lain, potensi Paguyuban KSE UNJ sebagai organisasi mahasiswa berbasis solidaritas dan pengabdian belum banyak dikaji secara mendalam sebagai aktor *community development* dalam memperkuat *civic engagement* masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bentuk partisipasi serta keterlibatan masyarakat dalam menumbuhkan kapasitas dan kemandirian melalui kegiatan *Community Development* Paguyuban KSE UNJ dalam penguatan *civic engagement* masyarakat di Muara Bakti Babelan dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian maka penelitian dibatasi dengan :

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dikaji yaitu bagaimana bentuk partisipasi masyarakat Desa Muara Bakti dalam program *Community Development* Paguyuban KSE UNJ sebagai wujud *civic engagement*.

2. Sub Fokus Penelitian

Subfokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana keterlibatan masyarakat dalam program *Community Development* Paguyuban KSE UNJ berperan dalam menumbuhkan kapasitas dan kemandirian masyarakat Desa Muara Bakti sebagai bagian dari penguatan *civic engagement*.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada fokus dan subfokus yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat Desa Muara Bakti dalam program *Community Development* Paguyuban KSE UNJ sebagai wujud *civic engagement*?
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam program *Community Development* Paguyuban KSE UNJ berperan dalam menumbuhkan kapasitas dan kemandirian masyarakat Desa Muara Bakti sebagai bagian dari penguatan *civic engagement*?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya

mengenai model intervensi pemberdayaan masyarakat sipil di tingkat lokal. Hasil studi ini akan memperkaya khazanah keilmuan tentang bagaimana integrasi antara pendekatan *community development* dan *civic education* non-formal dapat menjadi strategi yang efektif untuk menguatkan *civic engagement* dan menumbuhkan kapasitas masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat Muara Bakti Babelan adalah peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan praktis untuk berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah lokal dan mengadvokasi kepentingan mereka. Program *community development* yang difasilitasi oleh Paguyuban KSE UNJ diharapkan memberdayakan masyarakat agar tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan organisasi mereka sendiri.

b. Bagi Organisasi

Secara praktis, penelitian ini memberikan evaluasi mendalam terhadap dampak *community development* yang telah dilaksanakan terhadap *civic engagement*, sehingga Paguyuban KSE UNJ dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program mereka. Temuan penelitian akan berfungsi sebagai panduan dan rekomendasi untuk menyempurnakan modul, kurikulum, dan

metode pelatihan *community development* di masa mendatang, memastikan program Paguyuban KSE UNJ lebih efektif dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan penguatan *civic engagement*.

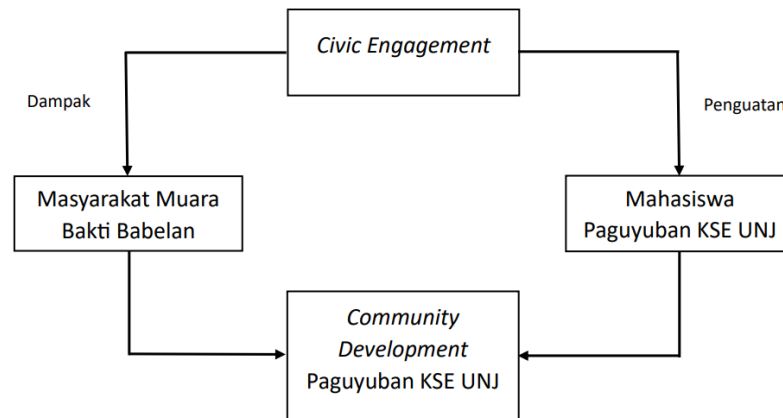
c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah, khususnya di wilayah Muara Bakti Babelan dan sekitarnya, mengenai potensi dan pola kolaborasi dengan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) untuk mempercepat pembangunan berbasis partisipasi. Hasil studi ini menunjukkan model implementasi yang berhasil dalam penguatan *civic engagement*, sehingga dapat direplikasi atau dijadikan acuan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal.

d. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas pemahaman peneliti terkait *civic engagement* dan *community development*, khususnya yang diwadahi oleh organisasi mahasiswa.

F. Kerangka Konseptual



Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual

